



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKI P] 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2022. Laporan ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja. Tujuan dari Laporan Penyusunan ini adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan dilaporkan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi serta Perencanaan Strategis Kota Cimahi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Cimahi, Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI, 



Ir. MEITY MUSTIKA, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630521 199303 2 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2022 menyajikan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Selama 1 (satu) tahun. Target Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. Untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turunnya kinerja yang telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra Tahun 2021. Selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target Kinerja tahun 2022 sebagian besar dapat tercapai. Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja, dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya solusi yang telah dilaksanakan.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Persentase capaian kinerja yang diukur dari Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Cimahi tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Persentase Rata -Rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2022**

No.	Sasaran	Persentase Rata – rata Capaian
1.	Meningkatnya kemantapan jalan kota	94,87%
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung Pemerintah kota	72,50 %
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	62,00 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
 Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Isu Strategis.....	2
1.4. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	5
1.5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	7
 Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	8
2.2. Perjanjian Kinerja.....	8
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perjanjian Kinerja	10
 Bab III PENGUKURAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Anggaran	
3.1. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	11
3.2. Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 & 2022.....	12
3.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	13
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	13
3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	14
3.6. Analisis Program Atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran.....	27
C. Cross Cutting Program	28
 Bab IV PENUTUP.....	29
 Lampiran-lampiran :	
1. PK Eselon II	
2. RKT	
3. Tabel Pengukuran Kinerja	
4. SK. Tim LKIP	
5. Monev Rencana Aksi	

BAB I

PENDAHULUAN

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi pembangunan Kota Cimahi adalah menumbuhkembangkan pembangunan diberbagai aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pembangunan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, memberikan ruang dan arah. Kebijakan ini perlu agar dapat menciptakan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, namun dilibatkan dan ditingkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan agar terwujud suatu tatanan pemerintahan yang mantap yang memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kota dan diselaraskan dengan RPJMD. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan - permasalahan kota serta semaksimal mungkin dapat memenuhi rencana pembangunan di Kota Cimahi.

Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II, III dan IV didalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan penggunaan sumber daya yang meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam hal ini, kinerja merupakan salah satu komponen dari prinsip "*Good Governance*" yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Seiring dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangannya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sejak berlakunya Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi yaitu :

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Surat Sekretaris Daerah Kota Cimahi No. 060/155/Org. Tanggal 17 Januari 2022 Penyampaian Dokumen SAKIP Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.3. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk dilaksanakan dan diselesaikan, baik isu nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, dituangkan dalam penyajian. Isu strategis merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dan selanjutnya dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Isu strategis berdasarkan dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk dilaksanakan. Adapun isu strategis bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah :

a. Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi adalah persoalan rendahnya *Level of Service* (LoS). Minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan seringkali menyebabkan arus lalu lintas terhambat.

Keberadaan status jalan kota di Kota Cimahi merupakan peningkatan status jalan kecamatan, sehingga kapasitas jalan yang ada belum dapat menampung volume kendaraan sesuai kondisi saat ini, dimana hal tersebut dari tahun ke tahun volume kendaraan selalu bertambah. Berdasarkan kondisional volume kendaraan

terus bertambah menyebabkan kualitas dan kapasitas jalan di Kota Cimahi menjadi rendah.

Berdasarkan kondisi permasalahan kapasitas jalan rendah, hal tersebut disebabkan salah satunya belum memiliki akses jalan lingkar selatan bagi kendaraan lintas kota yang melintasi bagian selatan Kota Cimahi. Hal tersebut menyebabkan kendaraan antar kota yang melewati Kota Cimahi menyebabkan padatnya lalu lintas dalam kota.

Kondisi adanya kemacetan transportasi dari arah timur Kota Cimahi ke arah barat Kota Cimahi (Kab. Bandung Barat ke Kota Bandung), salah satu alternatif sebagai pengurai kemacetan dengan adanya perlintasan sebidang dengan kereta api (jalan rel kereta api) antar jalan Gatot Subroto dan jalan Sriwijaya diperlukan suatu perencanaan transportasi pembangunan jalan.

Langkah strategis mengantisipasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tanggal 22 februari 2022 telah meresmikan pembangunan *Underpass* Dustira – Sriwijaya, hal tersebut diharapkan dapat melancarkan transportasi dari kemacetan.

Pengurangan kemacetan dengan kondisi jalan rendah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2022 telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan secara berkala di 3 (tiga) Kecamatan.

b. Kurangnya sarana dan prasana pelayanan publik

Permasalahan pelayanan terhadap masyarakat masih belum optimal dan kurangnya fasilitas tempat yang masih terpisah, terutama sistem pelayanan (sarana dan prasarana) secara digital/sistem terintegrasi, hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Berdasarkan Peraturan KemenPAN RB RI No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang berisikan :

- Peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Swasta pada satu tempat;
- Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Cimahi telah menandatangani MoU dengan Kementrian PAN RB pada Bulan Maret 2022, tentang peningkatan Pelayanan Publik Kota Cimahi. Wujud komitmen Pemerintah Kota Cimahi tentang peningkatan pelayanan publik

yang representatif, langkah strategis menuju pelayanan publik yang optimal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada 28 nopenber 2022 telah meresmikan pembangunan *Gedung Mal Pelayanan Publik*, hal tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2022 telah melaksanakan pemeliharaan gedung pemerintah dan fasilitas sosial.

c. Pembangunan yang tidak berizin dan masih banyaknya Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang

Permasalahan Pembangunan yang tidak terkendali dan tanpa perizinan dari pemerintah kota telah membuat wajah kota menjadi semrawut dan melenceng dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Diperlukan pengawasan dan pengendalian mengenai izin lokasi untuk menyesuaikan kembali dengan rencana tata ruang Kota Cimahi. Dan masih banyaknya pembangunan perumahan di Kota Cimahi menjadi satu potensi pendapatan untuk daerah. Selain itu juga terdapat potensi aset daerah yang ada di dalam perumahan tersebut berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Langkah strategis mengantisipasi hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2022 telah melaksanakan :

- Penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin maupun yang melakukan pembangunan menyalahi izin yang diberikan. Telah dilakukan penerbitan surat peringatan sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) buah di 33 lokasi berupa bangunan dan perumahan di Kota Cimahi.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2022 telah melaksanakan penyusunan revisi RTRW yang memuat :

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah dalam bentuk spasial dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dengan terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama turunannya serta dinamika pembangunan yang berkembang, maka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota menjadi penting. Sejak program kegiatan RTRW berpindah dari Bappeda ke DPUPR Kota Cimahi pada awal tahun 2022, maka penyelesaian revisi RTRW menjadi prioritas yang harus di selesaikan. Tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian Revisi RTRW menyelesaikan revisi RTRW yang awalnya berupa perubahan menjadi pencabutan RTRW yang mengharuskan merubah sebagian besar materi RTRW yang sudah disusun menyesuaikan dengan UU Cipta kerja beserta turunannya.

1.4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016). Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Pada saat ini Dinas PUPR Kota Cimahi didukung oleh pegawai berjumlah 80 orang, yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 43 orang
2. Pegawai Tenaga Harian Lepas sebanyak 37 orang

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2022**

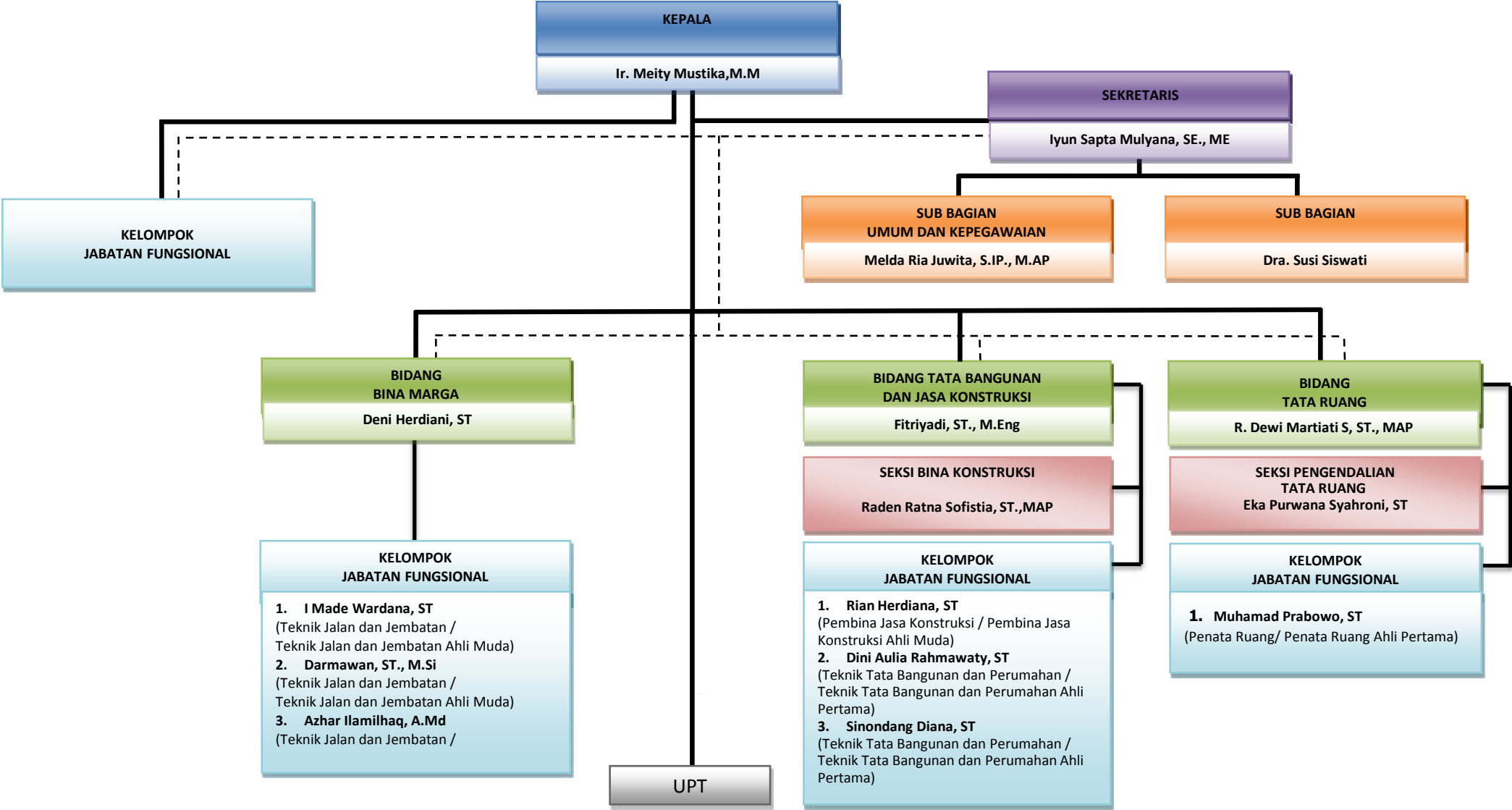
No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	5	0	1	-	6
2	III	6	7	5	8	26
3	II	-	1	2	8	11
4	I	-	-	-	-	-
Jumlah						43

Tabel 1.2

**DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2022**

No	Pendidikan	PNS	Tenaga Harian Lepas	Jumlah
1	SD		25	23
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA	8	6	14
4	DIPLOMA	6	1	7
5	S1	21	4	25
6	S2	7	-	7
7	S3	-	-	-
Jumlah		43	37	80

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

B A B II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	Kapasitas jalan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan kapasitas jalan tahun n	94,87 %
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik	Persentase bangunan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan prosentase bangunan tahun n	72,50 %
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	(Luas kawasan yang didirikan sesuai RTRW / Luas seluruh kawasan) x 100%	62,00 %

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berikut adalah target pencapaian yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2022 untuk lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2022 yang dituangkan dalam Perjannjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Panjang penataan pembangunan underpass sriwijaya (km)	0,204 km
		Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	101,336 km
		Panjang drainase jalan (km)	2,302 km
		Panjang trotoar jalan (km)	0,079 km
		Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap (m)	2,661,50 m
		Jumlah ruas jalan yang di inspeksi	108 ruas
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah Bangunan Gedung	1 unit
		Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	2 unit bangunan
		Jumlah tukang disertifikatkan	20 orang
		Jumlah peserta sosialisasi	20 orang
		Jumlah Verifikasi Bangunan Pemerintah untuk Dikaji Laik Fungsi	2 unit bangunan
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan	2 dokumen
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan
		Jumlah pemantauan pelaksanaan ijin pemanfaatan ruang	40 berkas

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, dengan Jumlah belanja langsung sebesar **Rp. 50.566.660.120,-** atau **91,40%** dari total SKPD pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 46.218.544.428,-** dan untuk capaian kinerja **98,30%**

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang rincian Program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Tahun 2022 sebagai berikut :

NO :	PROGRAM :	ANGGARAN :
		Rp. 50.566.660.120
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.695.446.289
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 32.100.684.269
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 6.996.755.362
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 292.000.000
5	Program Penyelenggaraan Penataaan Tata Ruang	Rp. 1.481.774.200

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

B A B III
PENGUKURAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tabel 3.1. menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi.

**3.1. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi
Tahun 2022**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kemandapan jalan kota	Panjang penataan pembangunan underpass sriwijaya (km)	0,204 km	0,204 km	100,00%
		Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	101,336 km	101,336 km	100%
		Panjang drainase jalan (km)	2,302 km	2,302 km	100%
		Panjang trotoar jalan (km)	0,079 km	0,079 km	100%
		Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap (m)	2.661,50 m	2.661,50 m	100%
		Jumlah ruas jalan yang di inspeksi	108 ruas	108 ruas	100%
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas	28 ruas	100%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah bangunan gedung yang terbangun	3 unit bangunan	3 unit bangunan	100%
		Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	2 unit bangunan	2 unit bangunan	100%
		Jumlah tukang disertifikatkan	20 orang	32 orang	100%
		Jumlah peserta sosialisasi	20 orang	32 orang	100%
		Jumlah Verifikasi Bangunan Pemerintah untuk Dikaji Laik Fungsi	2 unit bangunan	2 unit bangunan	100%

3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah pemantauan pelaksanaan ijin pemanfaatan ruang	40 berkas	40 berkas	100%

3.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2021 dan 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		KETERANGAN
			2021	2022	
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	93,37%	94,87%	
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik	71,00%	72,50%	.
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	62,00%	62,00%	

3.3. Realisasi capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	TARGET Renstra 2022	KET.
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	1	Persentase tingkat kemantapan jalan kota	94,87%	94,87%	
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	2	Persentase bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik	72,50%	72,50%	
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	3	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang	62,00%	62,00%	

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN	FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN	KETERANGAN
Bidang Tata Ruang : - Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang - Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Stake Holder lainnya yang terkait Perencanaan,Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang - Dilakukannya Pemantauan Rutin terhadap Pemanfaatan Tata Ruang - Meningkatnya peran serta masyarakat (LSM) dalam	- Tidak tersedianya anggaran - Kurangnya koordinasi - Sumber daya manusia terbatas - Kurang harmonisnya komunikasi dengan LSM	

pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang - Pelibatan tenaga Ahli dalam proses percepatan revisi RTRW dan Penyusunan RDTR	dalam pemberian penjelasan kegiatan - Perubahan peraturan perundang-undangan	
Bidang Bina Marga : • Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Adanya Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Tidak tersedianya anggaran yang memadai - Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan	
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi: • Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan • Bertanggung jawab Atas Pekerjaan • Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan	- Tidak tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan tidak tersedianya anggaran	

3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SUMBER DAYA	KONDISI	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN) DPUPR Kota Cimahi	Struktural = 9 orang Fungsional Umum = 0 orang	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

				atau Bangunan Lainnya 12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD
2.			II. Program Penyelenggaraan Jalan	17. Pelebaran Jalan Menuju Standar 18. Pembangunan Underpass 19. Penggantian Jembatan 20. Pemeliharaan Berkala Jalan 21. Pemeliharaan Rutin Jalan 22. Pemeliharaan Berkala Jembatan 23. Pengelolaan Leger Jalan 24. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.			III. Program penataan Bangunan Gedung	25. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 26. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 27. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
4.			IV. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	28. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan 29. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 30. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
5.			V. Program Penyelenggaraan Penataaan Tata Ruang	31. Sistem Informasi Penataan Ruang 32. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 33. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 34. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 35. Pelaksanaan Persetujuan

				Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 36. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 37. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 38. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 39. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 40. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--

3.6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN	PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENGALAMI KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Bidang Tata Ruang : 1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 3. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan rencana Tata Ruang	-	-
Bidang Bina Marga : 1. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 2. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan 3. Kegiatan Inspeksi kondisi Jalan 4. Kegiatan Inspeksi kondisi Jembatan	-	-
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi: 1. KegiatanRehabilitasi bangunan/gedung 2. Kegiatan Pembangunan bangunan/gedung 3. Kegiatan Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 4. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian bangunan	-	-

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada TA 2022 yaitu sebesar **Rp. 50.566.660.120,-** realisasi keuangan pada akhir tahun sebesar **Rp. 46.218.544.428,-** atau **91,40%** dan untuk realisasi fisik kegiatan **98,30%** sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp. 4.348.115.692,-** atau **8,60%**, Sehingga nilai penyerapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada TA 2022 sebenarnya secara persentase lebih dari angka tersebut diatas.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi terdapat di beberapa kegiatan antara lain pada

Dengan progres fisik **98,30%** dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Adapun pencapaian target yang tidak dapat direalisasikan adalah karena masalah eksternal.

Berikut dilampirkan laporan kegiatan, penyerapan anggaran beserta alasan tidak dapat direalisasikannya beberapa pekerjaan secara rinci pada masing-masing kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi TA 2022.

**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	91,69	Masukan	1	Dana	Rupiah	62.479.800,00	57.285.948,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Dokumen Perencanaan dan Anggaran PD	Dokumen	9,00	9,00	100,00	
					2	Forum SKPD	Kegiatan	1,00	1,00	100,00	
					3	Iuran Jaminan/Asuransi Tenaga Harian Lepas Administrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					4	Upah Jasa Tenaga Harian Lepas Admintrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Perencanaan dan Evaluasi PD	Bulan	12,00	12,00	100,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	66,67	Masukan	1	Dana	Rupiah	4.500.000,00	3.000.000,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Dokumen Evaluasi PD (LKIP, LKPD, LKPJ)	Dokumen	3,00	3,00	100,00	
				Hasil	1	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Perencanaan dan Evaluasi PD	Bulan	12,00	12,00	100,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	91,80	Masukan	1	Dana	Rupiah	8.124.135.819,00	7.458.012.412,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Pembayaran Gaji ASN	Bulan	14,00	14,00	100,00	
					2	Pembayaran Tunjangan Kinerja ASN	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					3	Pembayaran Tunjangan Transportasi ASN	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	80,01	Masukan	1	Dana	Rupiah	999.900,00	800.000,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	91,52	Masukan	1	Dana	Rupiah	47.719.800,00	43.671.448,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					2	Iuran Jaminan/Asuransi Tenaga Harian Lepas Administrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					3	Upah Jasa Tenaga Harian Lepas Admintrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Adminstrasi Keuangan Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	100,00	Masukan	1	Dana	Rupiah	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah Pegawai Non ASN Yg Tersosialisasi	Orang	35,00	35,00	100,00	
				Hasil	1	Persentase Pegawai Non ASN Yang Tersosialisasi	Persen	100,00	100,00	100,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	86,63	Masukan	1	Dana	Rupiah	269.100.170,00	233.123.200,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Jumlah bulan Penyediaan ATK	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					2	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	26,00	26,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	99,74	Masukan	1	Dana	Rupiah	133.725.500,00	133.374.300,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					2	Penyediaan Natura	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00	93,12	Masukan	1	Dana	Rupiah	25.743.300,00	23.971.600,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Penyediaan Cetak Dan Penggandaan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	Masukan	1	Dana	Rupiah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Penyediaan Bahan Bacaan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	99,92	Masukan	1	Dana	Rupiah	131.490.000,00	131.387.223,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Penyediaan Fasilitas Koordinasi Dan Konsultasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas	Bulan	12,00	12,00	100,00	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	91,18	Masukan	1	Dana	Rupiah	85.440.000,00	77.900.908,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Iuran Jaminan/Asuransi Tenaga Harian Lepas Administrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					2	Upah Jasa Tenaga Harian Lepas Administrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kedinasan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	19,22	Masukan	1	Dana	Rupiah	24.000.000,00	4.612.674,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Listrik	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kedinasan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	92,40	Masukan	1	Dana	Rupiah	99.877.000,00	92.282.908,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Iuran Jaminan/Asuransi Tenaga Harian Lepas Administrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					2	Penyediaan Kebersihan Kantor	Bulan	12,00	12,00	100,00	
					3	Upah Jasa Tenaga Harian Lepas Administrasi	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kedinasan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	90,46	Masukan	1	Dana	Rupiah	555.110.000,00	502.136.630,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Alat Berat (kendaraan roda dua 1 unit, roda empat 5 unit, Baby Roller 1 unit, Stoom Walls 3 unit, Genset Disel 1 unit)	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kedinasan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	94,84	Masukan	1	Dana	Rupiah	89.625.000,00	85.000.000,00	100,00	
					2	SDM	org	15,00	15,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN						KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
					3 Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli tidak digunakan karena tidak ada yang memenuhi syarat, Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan kembali pada TA. 2023
				Keluaran	1 Sewa Gudang	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Kedinasan	Bulan	12,00	12,00	100,00	
II	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									
17	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100,00	99,53	Masukan	1 Dana	Rupiah	100.000.000,00	99.532.000,00	99,53	
					2 SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3 Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1 Terlaksanakannya Laporan Bantuan Teknis	Buku	20,00	20,00	100,00	
					2 Terlaksanakannya Updating Sistem Informasi Monev Bangunan Gedung	Paket	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1 Tersusunnya Laporan Bantuan Teknis	Buku	20,00	20,00	100,00	
					2 Tersusunnya Laporan Updating Sistem Informasi Monev Bangunan Gedung	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
18	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	55,94	52,43	Masukan	1 Dana	Rupiah	1.000.000.000,00	524.290.210,00	52,43	
					2 SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3 Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1 Terkajinya Teknis Gedung Pemerintah	Paket	2,00	2,00	100,00	
					2 Terdatanya Bangunan Gedung Wilayah Cimahi Tengah	Paket	1,00	1,00	100,00	
					3 Tersosialisasikannya Peraturan-Peraturan Pemerintah	Paket	3,00	3,00	100,00	
				Hasil	1 Tersusunnya Dokumen Kajian Teknis Gedung Pemerintah	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
					2 Tersusunnya Dokumen Pendataan Bangunan Gedung Wilayah Cimahi Tengah	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					3 Tersusunnya Laporan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pemerintah	Laporan	3,00	3,00	100,00	
19	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100,00	93,17	Masukan	1 Dana	Rupiah	5.896.755.362,00	5.494.090.762,00	93,17	
					2 SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3 Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1 Terselaksanakannya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah yang terpelihara	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
					2 Terselaksanakannya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung yang terehabilitasi	Dokumen	6,00	6,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
					3	Terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintah yang terpelihara	Bangunan	2,00	2,00	100,00	
					4	Terehabilitasinya Bangunan Gedung yang direhabilitasi	Bangunan	6,00	6,00	100,00	
					5	Terselesaikannya Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah yang terpelihara	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
					6	Terselesaikannya Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung yang terehabilitasi	Dokumen	6,00	6,00	100,00	
					7	Terselenggaranya Workshop Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	Paket	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah yang terpelihara	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
					2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung yang terehabilitasi	Dokumen	6,00	6,00	100,00	
					3	Terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintah yang terpelihara	Bangunan	2,00	2,00	100,00	
					4	Terehabilitasikannya Bangunan Gedung yang direhabilitasi	Bangunan	6,00	6,00	100,00	
					5	Tersusunnya Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Pemerintah yang terpelihara	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
					6	Tersusunnya Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung yang terehabilitasi	Dokumen	6,00	6,00	100,00	
					7	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Workshop Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	Paket	1,00	1,00	100,00	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
20	Pengelolaan Leger Jalan	100,00	98,80	Masukan	1	Dana	Rupiah	311.959.800,00	308.223.300,00	98,80	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusnya Database Jalan dan Jembatan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					2	Tersusunnya Laporan Pemutakhiran Leger jalan,Drainase dan Trotoar	Dokumen	3,00	3,00	100,00	
				Hasil	1	Terssedianya Database Jalan dan Jembatan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					2	Tersedianya Laporan Pemutakhiran Leger jalan,Drainase dan Trotoar	Dokumen	3,00	3,00	100,00	
21	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100,00	99,05	Masukan	1	Dana	Rupiah	600.000.000,00	594.327.200,00	99,05	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusnya jembatan yang disurvey	Lokasi	30,00	30,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
					2	Tersusunnya Ruas Jalan yang disurvey	Ruas	108,00	108,00	100,00	Sehubungan Anggaran pembebasan lahan pada APBD Tahun 2023 tidak dianggarkan, maka proses pembuatan dokumen appraisal tidak dilanjutkan, dikarenakan dokumen appraisal hanya berlaku selama 6 bulan
					3	Tersusnya Sistem Informasi Jalan dan Jembatan (SILAJA)	Sistem	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Tersedianya jembatan yang disurvey	Lokasi	30,00	30,00	100,00	
					2	Tersedianya Ruas Jalan yang disurvey	Ruas	108,00	108,00	100,00	
				Hasil	3	Tersedianya Sistem Informasi Jalan dan Jembatan (SILAJA)	Sistem	1,00	1,00	100,00	
22	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3,15	3,12	Masukan	1	Dana	Rupiah	212.749.300,00	6.648.400,00	3,12	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusunnya Dokumen Appraisal	Dokumen	1,00	0,00	0,00	
				Hasil	1	Tersedianya Dokumen Apraisal	Dokumen	1,00	0,00	0,00	
23	Pemeliharaan Berkala Jalan	100,00	96,01	Masukan	1	Dana	Rupiah	25.432.303.391,00	24.418.399.595,00	96,01	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusunnya Dokumen DED	Dokumen	12,00	12,00	100,00	
					2	Tersusunnya Dokumen Pengawasan	Dokumen	14,00	14,00	100,00	
					3	Tersusunnya Ruas Jalan Kota yang dipelihara	Ruas	18,00	18,00	100,00	
					4	Tersusunnya Ruas Jalan Lingkungan yang dipelihara	Ruas	87,00	87,00	100,00	
				Hasil	1	Tersusunnya Dokumen DED	Dokumen	12,00	12,00	100,00	
					2	Tersusunnya Dokumen Pengawasan	89+	14,00	14,00	100,00	
					3	Tersusunnya Ruas Jalan Kota yang dipelihara	Ruas	18,00	18,00	100,00	
					4	Tersusunnya Ruas Jalan Lingkungan yang dipelihara	Ruas	87,00	87,00	100,00	
24	Pemeliharaan Rutin Jalan	94,99	85,17	Masukan	1	Dana	Rupiah	2.991.772.500,00	2.548.042.083,00	85,17	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Ruas Jalan yang dipelihara	Ruas	40,00	40,00	100,00	
				Hasil	1	Terpeliharanya kondisi jalan yang mantap	Ruas	40,00	40,00	100,00	
25	Pembangunan Underpass	99,38	91,92	Masukan	1	Dana	Rupiah	1.939.798.578,00	1.783.136.098,00	91,92	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
				Keluaran	1	Tersusunnya Dokumen DED	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena penyiapan instruktur/asesor sudah terakomodir dalam kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Anggaran untuk kegiatan ini sudah terakomodir pada kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
					2	Tersusunnya Dokumen Pengawasan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					3	Panjang Penataan Underpass	km	0,63	0,63	100,00	
				Hasil	1	Tersedianya Dokumen DED	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					2	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					3	Terbangunnya Panjang Penataan Underpass	km	0,63	0,63	100,00	
26	Pemeliharaan Berkala Jembatan	100,00	26,09	Masukan	1	Dana	Rupiah	612.100.700,00	159.689.900,00	26,09	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					2	Tersusunnya Dokumen Pengawasan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					3	Terlaksananya pemeliharaan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan haji haris	Jembatan	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					2	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
					3	Terpeliharanya jembatan haji haris	Jembatan	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	94,87	94,87	100,00	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										
27	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	85,60	85,20	Masukan	1	Dana	Rupiah	50.000.000,00	42.601.400,00	85,20	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terselenggaranya Sertifikasi Keahlian ASN	Paket	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Tersertifikasinya Sertifikasi Keahlian ASN	Orang	10,00	1,00	10,00	
28	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	0,00	0,00	Masukan	1	Dana	Rupiah	22.000.000,00	0,00	0,00	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersedianya Pelatih Tenaga Konstruksi	Orang	3,00	0,00	0,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
				Hasil	1	Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Konstruksi	Orang	3,00	0,00	0,00	Proses persetujuan substansi revisi RTRW menunggu SK Penetapan LSD dari Kementerian ATR/BPN, Akan dilaksanakan setelah SK Penetapan LSD dari Kementerian ATR/BPN terbit
29	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100,00	88,14	Masukan	1	Dana	Rupiah	160.000.000,00	141.016.775,00	88,14	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terlaksananya Tukang untuk Pelatihan Tenaga Terampil Konsruksi	Orang	32,00	32,00	100,00	
				Hasil	1	Tersosialisasinya Tukang untuk Pelatihan Tenaga Terampil Konsruksi	Orang	32,00	32,00	100,00	
30	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	100,00	87,19	Masukan	1	Dana	Rupiah	60.000.000,00	52.311.000,00	87,19	
					2	SDM	org	13,00	13,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terlaksananya Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	32,00	32,00	100,00	
				Hasil	1	Tersertifikasinya Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	32,00	32,00	100,00	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										
31	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	90,04	80,50	Masukan	1	Dana	Rupiah	96.400.000,00	77.600.000,00	80,50	Menunggu proses persetujuan substansi revisi RTRW
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kota Cimahi	Laporan	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Tersedianya RTRW dan RDTR yang ditetapkan	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
32	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	100,00	83,70	Masukan	1	Dana	Rupiah	300.000.000,00	251.097.360,00	83,70	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusunnya Laporan Penyusunan RDTR Kota Cimahi	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
				Hasil	1	Tersedianya RTRW dan RDTR yang ditetapkan	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
33	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	97,51	65,05	Masukan	1	Dana	Rupiah	413.220.000,00	268.806.400,00	65,05	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Tersusunnya Draft Dokumen Kebijakan	Dokumen	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Tersedianya RTRW dan RDTR yang ditetapkan	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
34	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	100,00	70,57	Masukan	1	Dana	Rupiah	78.918.400,00	55.689.600,00	70,57	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	Masih dalam tahap persiapan menunggu penetapan RTRW
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terlaksanakannya sosialisasi kebijakan dan peraturan Bid. Penataan Ruang	Sosialisasi	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Tersedianya RTRW dan RDTR yang ditetapkan	Dokumen	2,00	2,00	100,00	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	100,00	97,60	Masukan	1	Dana	Rupiah	13.200.000,00	12.883.500,00	97,60	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terlaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi untuk penyusunan RTRW Kota Cimahi	Laporan	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Terlaksananya penyusunan RTRW dan RDTR	Laporan	2,00	2,00	100,00	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100,00	80,51	Masukan	1	Dana	Rupiah	13.200.000,00	10.627.000,00	80,51	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terlaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi untuk penyusunan RRTR Kota Cimahi	Laporan	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Terlaksananya penyusunan RTRW dan RDTR	Laporan	2,00	2,00	100,00	
37	Sistem Informasi Penataan Ruang	100,00	96,81	Masukan	1	Dana	Rupiah	265.000.000,00	256.548.750,00	96,81	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Telaksanakannya pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem	1,00	1,00	100,00	
				Hasil	1	Terpeliharanya Sistem informasi Penataan Ruang	Sistem	1,00	1,00	100,00	
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	99,00	83,38	Masukan	1	Dana	Rupiah	75.115.800,00	62.630.000,00	83,38	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terlaksanakannya koordinasi dan sinkronisasi terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terawasinya Pemanfaatan Ruang	Bulan	12,00	12,00	100,00	
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100,00	30,79	Masukan	1	Dana	Rupiah	50.000.000,00	15.395.000,00	30,79	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	

NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	REALISASI		PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN							KETERANGAN
		FISIK (%)	KEU (%)	INDIKATOR			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
				Keluaran	1	Terlaksanakannya Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terawasinya Pemanfaatan Ruang	Bulan	12,00	12,00	100,00	
40	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,00	83,13	Masukan	1	Dana	Rupiah	176.720.000,00	146.898.844,00	83,13	
					2	SDM	org	12,00	12,00	100,00	
					3	Waktu	bulan	12,00	12,00	100,00	
				Keluaran	1	Terlaksanakannya koordinasi terkait pelaksanaan penataan ruang	Bulan	12,00	12,00	100,00	
				Hasil	1	Terawasinya Pemanfaatan Ruang	Bulan	12,00	12,00	100,00	

C. CROSS CUTTING PROGRAM

LINTAS SKPD			LINTAS INSTANSI VERTIKAL		
NO	BANTEK	KOORDINASI	NO	BANTEK	KOORDINASI
1	DINKES	DISHUB	1	TNI	BPN
2	RSUD	DPMPTSP	2	POLRES	BPS
3	DISDIK	SATPOL PP	3	KEJAKSAAN	
4	DISBUDPARPORA	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	4	BPN	
5	INSPEKTORAT	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5	BPS	
6	KECAMATAN	DPKP	6	TTUC	
7	KELURAHAN	DLH			

Target Capaian Renstra 2017 - 2022

No.	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	92,40%	93%	93,50%	94%	93,37%	94,87%	94,87%
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas bangunan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase bangunan pemerintah kota yang dibangun dan atau direhabilitasi	183	3,76%	2,59%	5,23%	-	-	
				Persentase bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik		-	-	-	72,50%	74%	74%
3	Belum optimalnya kesesuaian pembangunan dengan perencanaan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Persentase kesesuaian RTRW	59%	60%	60%	61%	-	-	
			Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan tata ruang		-	-	-	62%	62%	62%

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi ini disusun berdasarkan hasil analisa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan didasarkan pada analisis obyektif terhadap data, fakta dan informasi yang sebenarnya.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian Kinerja Dinas untuk menunjang Visi dan Misi Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi diharapkan dapat menjadi salah satu Dinas andalan Pemerintah Kota Cimahi.

Demikian pula dengan hambatan dan kendala pelaksanaan tugas dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2022 ini pada umumnya lebih pada permasalahan internal yang menyangkut persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi antar Dinas/Instansi/Lembaga di daerah maupun di pusat, serta permasalahan baru yang muncul bersamaan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini menjadi kendala yang umum ditemukan pada sistem pemerintahan baru seperti halnya Pemerintah Kota Cimahi.

Permasalahan dan kendala eksternal yang menyangkut kesadaran partisipasi masyarakat yang dirasakan masih kurang dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemukiman/perkotaan tetap menjadi permasalahan yang harus terus diupayakan peningkatannya.

Permasalahan tersebut diatas kiranya dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi, hubungan dan kerjasama yang baik antar Dinas, Instansi dan Lembaga khususnya di Kota Cimahi. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkannya sosialisasi dan proses pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh stake holder di Kota Cimahi.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa datang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik, diharapkan menjadi sarana bagi upaya perwujudan *Clean Government* dan *Good Governance*.